

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA

Farli Jemri Rolos¹Arman T. Naukoko²Steeva Y.L. Tumangkeng³

^{1,2,3} *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Raturangi, Manado 95115, Indonesia
Email : farlirolos061@student.unsrat.ac.id*

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa dengan melihat faktor-faktor yang memberikan pengaruh yaitu pajak daerah dan investasi swasta metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis tabel. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa, Untuk mengetahui besarnya pengaruh Investasi swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa, Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah dan Investasi Swasta secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian secara individu variabel pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara untuk variabel Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan secara bersama-sama variabel Pajak Daerah dan Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. Analisis Potensi Pajak Darah sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kota Metro dimana pajak darah mampu memberikan pengaruh dan memiliki potensi terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Metro.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Investasi Swasta

ABSTRACT

Regional own-source revenue (PAD) is one form of fiscal decentralization to provide sources of revenue for regions that can be extracted and used by themselves according to their potential. In this study, the objective is to analyze the potential of regional original income of Minahasa Regency by looking at the factors that provide the influence of local taxation and private investment analysis method used is multiple linear regression analysis and table analysis. To find out the magnitude of the influence of Local Taxes on Local Revenue in the Minahasa Regency, To find out the magnitude of the influence of private investment on the Regional Original Revenue in the Minahasa Regency, To find out the influence of Regional Taxes and Private Investments in a slender manner to the Original Local Revenue in the Minahasa Regency. The results of the individual study of the tax variable are able to provide a positive and significant effect on the Regional Genuine Revenue, while for the Inv variable Private estates have no effect on the Regional Revenue, and together the Regional Tax and Investment variables have a significant influence on the increase of the Regional Revenue of the Minahasa Regency. Analysis of the Potential of Blood Tax as a source of genuine blood income in Metro City where blood tax is able to exert influence and has the potential for the development of Blood Original Income in Metro City.

Keyword: Local Revenue, Local Taxes, Private Investment

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan asli daerah di Indonesia merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini selaras dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu sumber utamanya adalah Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya berkaitan erat dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan dan belanja. Perbedaan potensi ini mengakibatkan ketimpangan antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen (Listiorini, 2012). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah termasuk Kabupaten Minahasa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat, hal ini disebabkan karena proporsi pendapatan asli daerah relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah. (Suhendi 2008).

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah mengenai pajak. Peran strategis pajak daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi, dengan melihat fenomena umum yang terjadi dengan peningkatan pendapatan daerah yang ada, dimana Pajak belum mampu memberikan

peran yang signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah, hal ini dikarenakan masih terdapat banyak oknum-oknum tertentu yang tidak membayar pajak secara baik, oleh pemerintah secara khusus melakukan peningkatan secara efektif dan efisien dalam upaya pemungutan pajak agar terlaksana sesuai yang diharapkan pada umumnya.

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan cakupan wilayah yang cukup besar serta memiliki potensi yang memadai dalam peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa memiliki peningkatan yang cukup signifikan pada setiap Tahunnya yang dilihat dalam jumlah dana Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada periode 15 Tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Minahasa
Tahun Anggaran 2003-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	%
2003	13.534.470.000	-
2004	9.793.180.000	-27
2005	9.793.180.000	0
2006	10.108.530.000	3,22
2007	15.254.020.000	50
2008	16.854.040.000	10
2009	17.197.010.000	2,03
2010	24.660.930.000	43
2011	23.809.050.000	-3,45
2012	22.716.640.000	-4,5
2013	31.964.850.000	40
2014	58.778.370.000	83
2015	62.245.340.000	5,8
2016	77.398.650.000	24
2017	112.621.990.000	45

Sumber : BPS. Kab Minahasa Tahun 2003-2018

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa Dana Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami beberapa kali angka fluktuasi terhitung pada Tahun 2003 dengan dana realisasi sebesar 13,5 Miliar rupiah mengalami penurunan angka pada Tahun 2004 yaitu dengan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,7 dan kemudian di Tahun 2006 kembali mengalami peningkatan sebesar 10,1 miliar rupiah dan sampai penghujung Tahun 2017 realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 112,6 miliar rupiah.

Kondisi Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Minahasa dinilai cukup besar dan berpengaruh bagi peningkatan pendapatan daerah yang ada. Pendapatan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada penjelasan tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Minahasa
Tahun Anggaran 2003-2017

Tahun	Pajak Daerah	%
2003	3.383.726.000	-
2004	1.682.604.543	1,6
2005	1.682.604.543	0
2006	2.333.886.496	2,3
2007	4.870.231.162	4,87
2008	6.824.396.087	6,82
2009	8.515.457.696	8,51
2010	9.208.217.478	9,20
2011	10.075.994.263	1,00
2012	10.419.017.784	1,04
2013	12.660.073.024	1,26
2014	19.468.059.670	1,25
2015	24.792.193.897	2,47
2016	28.662.132.200	2,86
2017	37.664.811.000	3,76

Sumber : *BPS Kab. Minahasa Tahun 2003-2017*

Pada tabel 1.2 diatas bahwa pajak daerah beberapa kali mengalami angka fluktuasi di Tahun 2003 pajak daerah sebesar 3,383 milyar rupiah dan menurun pada Tahun 2004 dengan realisasi nilai pajak hanya sebesar 1,682 milyar rupiah, dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2006 sebesar 2,333 milyar rupiah dan meningkat sampai pada Tahun 2017 sebesar 37.664milyar rupiah.. Selain Pajak Daerah terdapat pula faktor lain yang menunjang peningkatan Pendapatan Asli daerah yaitu melalui tingkat Investasi yang ada di Kabupaten Minahasa.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan untuk mengidentifikasih faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan analisis diantaranya, Analisis tabel, Analisis kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan program *Microsoft Excel* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.Maka peneliti menggunakan analisis linear berganda.Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (dependent variabel), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui.Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (independent variabel).

Model regresi berganda terdiri dari lebih satu variabel independen dikenal dengan model regresi berganda. Bentuk umum regresi berganda dengan sejumlah k variabel independen dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + e_i \dots\dots\dots 3.1$$

Model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen. Misalkan kita mempunyai model sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i \dots\dots\dots 3.2$$

Keterangan

Y_i = Variable dependen

B_0 = Intersep konstana

$\beta_1 X_{1i}$ = Variabel independen X_1

$\beta_2 X_{2i}$ = Variabel independen X_2

Dimana Y_i adalah variabel dependen, X_1 dan X_2 adalah variabel dependen e_i adalah variabel gangguan. Subskrip i menunjukkan observasi ke- i untuk data *cross section* dan jika kita digunakan data *time series* biasanya kita beri subskrip t yang menunjukkan waktu, sementara untuk β_0 disebut intersep, sedangkan β_1 dan β_2 dalam regresi berganda disebut koefisien regresi parsial. Dari persamaan regresi berganda kemudian data ditransformasikan dalam bentuk LN atau Logaritma Natural, tujuannya untuk menghasilkan model terbaik yang terbebas dari masalah heterokedastisitas dan autokorelasi. (Agus Widarjono, 2013).

Definisi Oprasional dan Pengaruh Variabel

Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagaipenambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang digunakan adalah umblah penerimaan daklam suatu rupiah yang ada di Kabupeaten Minahasa.

Pajak Daerah (X_1) adalah iuran pribadi yang di lakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlh dana penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa dalam satuan rupiah.

Investasi Swasta (X_2) adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam memperoleh laba. Dan data investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlh dana realisasi Investasi Swasta di Kabupaten Minahasa dalam satuan rupiah.

Uji t-test statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut : Hipotesis : 1). $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 2). $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 3). Nilai t tabel dapat dicari dengan rumus : T tabel : $t_{\alpha} : n-k$. Dimana : α = derajat signifikan, n = jumlah sampel (observasi) k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta 4). T hitung dapat dicari dengan rumus : Dimana : $t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$, β_i = koefisien regresi, $Se(\beta_i)$ = standar error Koefisien Regresi. Kriteria pengujian : 1). Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 2). Jika t hitung $>$ maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F- statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis : 1). $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 2). $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 3). Nilai F table dapat dicari dengan rumus : F table : $F_{\alpha} : n-k : k-1$, Dimana : α = derajat signifikan, n = jumlah sampel (observasi), k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta, F-hitung diperoleh dengan rumus : $F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$. Dimana : R^2 = koefisien determinasi, n = jumlah sampel (observasi), k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta. Kriteria pengujian : 1). Jika F hitung $<$ F table, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 2). Jika F hitung $>$ F table, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (Agus Widarjono : 2013)

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multikolonieritas, Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Koefisien Determinasi R^2

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punyai. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk menghitung koefisien determinasi (R^2) regresi sederhana. $R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS-SSR}{TSS}$, $R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS}$, $1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$ (Agus Widarjono hal : 179, 2013).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan regresi berganda dapat dilihat dalam lampiran hasil olahan eviews dimana variabel Pajak Daerah dan Investasi Swasta sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen dilihat pada tabel 4.13 :

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.688914	0.831648	5.638101	0.0001
X ₁	0.944847	0.085387	11.06553	0.0000
X ₂	-0.429206	0.156254	-2.746857	0.0005
R-squared	0.949161	Mean dependent var	10.39313	
Adjusted R-squared	0.940688	S.D. dependent var	0.341738	
S.E. of regression	0.083227	Akaike info criterion	-1.957640	
Sum squared resid	0.083120	Schwarz criterion	-1.816030	
Log likelihood	17.68230	Hannan-Quinn criter.	-1.959148	
F-statistic	112.0207	Durbin-Watson stat	1.117148	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah eviews 0.8

$$Y = 4.688914 + 0.944847 X_1 - 0.429206 X_2$$

Berdasarkan tabel 4.3 hasil olahan eviews menjelaskan hasil nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 4.688914, variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 0.944847 dan variabel Investasi Swasta (X_2) sebesar -0,429206.

Hasil Uji Parsial t terhadap parameter Pajak Daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis $H_0: \beta_1 = 0$, artinya variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa (Y).

$H_0: \beta_1 \neq 0$, artinya variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa (Y).

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :

$$t \text{ tabel} : t_{\alpha; n-k, \alpha = 5\%, = 0,5}$$

$N = 15 =$ Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah $N - k = 15 - 3 = 12$ lalu lihat tabel t distribution (df,F) $\sim (12; 0,5)$ t tabel = 1,782 dan t hitung = 11,065

Karena t hitung $>$ t tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara Parsial variabel independen Pajak Daerah (X_1) mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X_1 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa Pajak Daerah mampu 11,065 memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai koefisien β_1 sebesar artinya hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh X_1 terhadap Y signifikan pada ($\alpha = 0,005$).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferry Susanawa Tahun 2014 tentang Analisis Potensi Pajak Darah sebagai sumber pendapatan asli darah di Kota Metro dimana pajak darah mampu memberikan pengaruh dan memiliki potensi terhadap perkembangan Pendapatan Asli Darah yang ada di Kota Metro.

Hasil Uji t terhadap parameter Investasi Swasta (X_2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis $H_0: \beta_2 = 0$, artinya variabel Investasi Swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa (Y).

$H_0: \beta_2 \neq 0$, artinya variabel Investasi Swasta berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa (Y).

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :

$$t \text{ tabel} : t_{\alpha; n-k, \alpha = 5\%, = 0,5}$$

$N = 15 =$ Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah $N - k = 15 - 3 = 12$ lalu lihat tabel t distribution (df,F) $\sim (12; 0,5)$. t tabel = 1,782 dan t hitung = 2,746

Karena t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara Parsial variabel independen Investasi Swasta (X_2) mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta Pemerintah dapat

memberikan pengaruh yang terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. (Agus Widarjono, 2013).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikha Mekhasari Tahun 2013 tentang Pengaruh Investasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Uji Simultan F statistik

Hipotesis : $H_0: \beta_1 = \beta_2$, artinya secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 tidak berpengaruh jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa (Y). $H_a: \beta_1 \neq \beta_2$ artinya secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 , berpengaruh terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa (Y). $\Omega = 5\%$, $N =$ jumlah observasi, $K = 3$ Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah $N - k = 15 - 3 = 12$ lalu lihat F tabel distribusi values = $(\Omega = 0,5 : k - 1, n - k) = F \text{ tabel} = 3,49$ $F \text{ hitung} = 112,02$.

Karena $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa (Y). (Agus Widarjono, 2013).

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat digunakan dengan menggunakan metode deteksi klien yaitu *regrexu auxiliary* dengan mendapatkan determinasinya r^2 , X_1 , X_2 , lebih besar dari r^2 maka model mengandung unsur multikolinieritas antara variabel independenya dan sebaliknya maka tidak ada korelasi antara variabel independen. (Agus widarjono, 2013)

Tabel 4.13 Hasil Multikolinieritas

Variabel	LOG(X_1)	LOG(X_2)
LOG(X_1)	1.000000	0.802521
LOG(X_2)	0.801521	1.000000

Sumber : *Olahan Eviews 0.8*

Tabel 4.10 korelasi antara Log X_1 dengan Log X_2 sebesar 1.000000 dan korelasi antara Log X_2 dan Log X_1 sebesar 0.801521. Melihat rendahnya nilai koefisien korelasi maka diduga tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *White test*, yaitu dengan membandingkan $obs - R^2$ atau X_2 hitung terhadap X_2 tabel. Kriteria keputusan sebagai berikut : Jika nilai $Obs - R^2$ atau X_2 hitung $> X_2$ tabel ($prob < 0,05$), maka hipotesa yang menyatakan bahwa ada masalah heterokedasitas dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak dan jika nilai $Obs - R^2$ atau X_2 hitung $< X_2$ tabel ($prob < 0,05$), maka hipotesa yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.

Model mengandung heteroskedastisitas bias dapat dilihat dari nilai probabilitas *Chi -Squares* sebesar 0.7001 atau pada $a = 70,01$ yang lebih besar dari $a = 5\%$ berarti H_0 di terima dan kesimpulanya tidak ada heteroskedastisitas.-

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara error pada masa lalu dan error pada masa sekarang dalam suatu variabel. Model persamaan regresi penelitian ini menggunakan analisis *durbin-watson* untuk melihat apakah terdapat autokorelasi dalam model. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa dalam model persamaan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *durbin-watson* pada hasil estimasi sebesar 1.117 dimana nilai tersebut berada diantara d_l dan d_u , pada batas dimana tidak terdapat autokorelasi jika berada pada nilai antara $d_l = 0,814$ dan $d_u = 1,750$.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang di tujukan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.949 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Investasi Swasta mampu menjelaskan atau mempengaruhi 0.949% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sisanya 0,051 % di pengaruhi oleh variabel di luar variabel Pajak Daerah dan Investasi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah mampu memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa
2. Investasi Swasta memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa
3. Pajak Daerah dan Investasi Swasta secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa.

Saran

1. Untuk Pemerintah

Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa kedepan adalah memberikan kebijakan terhadap proses kebijakan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran pemerintah khususnya pemungutan pajak pada berbagai sektor yang ada memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan dalam menjaga hubungan dengan pemerintah pusat sebagai koordinasi internal, kemampuan cepat tanggap terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat, kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam upaya menarik minat para investor-investor dalam menjlankan usahanya serta

mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses meningkatkan pendapatan daerah.

2. Untuk Kalangan Akademik

Dari hasil penelitian ini maka diharapkan bagi mahasiswa agar dapat menggunakannya sebagai bahan perbandingan dengan masalah-masalah yang ada di Luar Kabupaten Minahasa dan dapat dijadikan sebagai alat tolak ukur pemerintah di dalam keberhasilan pembangunan daerah dan terutama didalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul.H. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hendi.S Muamalah.fiqh. Jakarta, PT RajaGrafindi Persada, 2008
- Juli Panglima.S. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Mandala.M dan Pratama.R.Pratama. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Sadono.S.2007. Makro Ekonomi Modern. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Sadono.S. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Penerbit PT. Salemba, Jakarta.
- Safir.S.2004. Seri perencanaan keuangan keluarga : mencari keuangan tambahan. Jakarta Elex Media Komputindo
- Widarjono.A .(2013).Ekonometrika:Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia,Jakarta.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paak Daerah dan Retribusi Daerah Minahasa dalam angka Tahun 2003-2018